

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON

Moh. Taufik Hidayat, Nursahidin, Adesi Wulandari
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat
Email: haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v5i1.10961

Diterima: Pebruari 2025; Direvisi: Maret 2025; Dipublikasikan: April 2025

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan adalah isu yang harus segera ditangani oleh pemerintah untuk diselesaikan dan memutuskan rantai penyebabnya. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana cara kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Teori yang diacu untuk mempelajari kebijakan penanggulangan kemiskinan ialah teori Van Meter dan Van Horn. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan pengumpulan dokumen. Untuk analisis data, dilakukan melalui reduksi data, pengumpulan informasi, dan teknik triangulasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dasar serta tujuan kebijakan dari teori yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon belum tercapai. Sementara itu, sumber kebijakan yang mencakup pendanaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon masih sangat terbatas, dan kualitas sumber daya manusia masih rendah akibat minimnya pendidikan dan pengetahuan. Selain itu, variabel komunikasi organisasi serta aktivitas pelaksanaan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon masih menunjukkan kurangnya akurasi dalam berkomunikasi dengan pelaksana kebijakan dan kurang konsisten, terutama pada aspek pengawasan dan kelengkapan sarana serta prasarana. Untuk variabel karakteristik badan pelaksana, yang mencakup kemampuan pelaksana dan disiplin kerja, kemampuan pelaksanaan kebijakan sudah berada pada tingkat cukup baik, sedangkan disiplin kerja masih belum memadai. Selanjutnya, variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik masih perlu untuk dipertimbangkan. Terakhir, terdapat variabel kecenderungan pelaksana yang meliputi motivasi dan komitmen yang sudah cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pakaian, dan makanan. Ini juga merupakan isu global yang muncul akibat sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ketidakmampuan ini terlihat dari rendahnya pendapatan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, konsekuensi dari rendahnya penghasilan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Menurut data dari tribunnews.com tahun 2019, masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat dalam proses pembangunan suatu negara. Kemiskinan paling parah terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan memiliki dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 yang membahas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, terdapat sejumlah kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, antara lain:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
2. Program Berbasis Pemberdayaan;
3. Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.

Kota Cirebon adalah salah satu daerah yang menerapkan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPA) Kota Cirebon, jumlah masyarakat miskin meningkat dari 27. 252 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2015 menjadi 27. 881

pada tahun 2018. Angka kemiskinan di kota ini kembali meningkat dari 27. 881 KK pada tahun 2018 menjadi 28. 383 KK pada tahun 2019, dengan rincian angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi lima Kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Pekalipan sebanyak 4. 556 KK, (2) Kecamatan Lemah Wungkuk dengan 8. 957 KK, (3) Kecamatan Kejaksan sebanyak 5. 485 KK, (4) Kecamatan Kesambi 7. 074 KK, dan (5) Kecamatan Harjamukti dengan 12. 922 KK. Dari data itu, Kecamatan Harjamukti memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kota Cirebon sebesar 9. 207 KK, dan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan ini adalah 12. 922. Peningkatan jumlah kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Harjamukti adalah masalah yang kompleks terkait kesejahteraan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang dan jasa, gender, kondisi lingkungan, lokasi geografis, dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan oleh para pelaksana.

Di tengah permasalahan yang ditemukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, peneliti tertarik untuk melakukan studi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang yang telah diuraikan,

identifikasi yang akan diteliti dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pelaksanaan kebijakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon?
3. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penerapan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta yang menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan kesejahteraan sosial untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui tindakan-tindakan yang telah dilakukan guna mengatasi kendala-kendala dalam penerapan kebijakan kesejahteraan sosial untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Kegunaan Penelitian

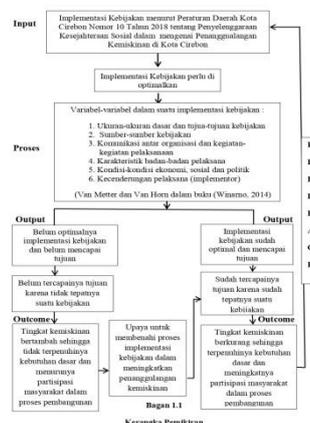
1. Manfaat Penelitian Dari Sudut Pandang Teoritis. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperkaya kajian mengenai pelaksanaan kebijakan dalam menangani kemiskinan serta untuk mengevaluasi keterkaitan antara teori-teori yang telah dipelajari dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
2. Manfaat Penelitian Dari Sudut Pandang Praktis. Temuan dari penelitian ini

diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam menghadapi kemiskinan, terutama di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti.

Kerangka Pemikiran

Model pelaksanaan kebijakan yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam buku Winarno yang berjudul Kebijakan Publik (2014:159-168). Model ini menjelaskan bahwa ada beberapa variabel yang saling memengaruhi kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah:

1. Ukuran dan tujuan yang mendasari kebijakan;
2. Sumber dari kebijakan;
3. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksanaan;
4. Ciri-ciri lembaga yang melaksanakan;
5. Situasi ekonomi, sosial, dan politik;
6. Kebiasaan para pelaksana.



Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

Definisi Konsep Penelitian

Agar dapat mengidentifikasi batasan masalah dengan lebih jelas, penulis akan menyederhanakan pemahaman mengenai isu yang sedang dianalisis. Oleh

karena itu, penulis mengusulkan berbagai konsep penelitian yang terdiri dari:

1. Implementasi berarti tindakan yang diambil oleh individu atau pejabat, termasuk sektor swasta, yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suaib 2016:81). Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada penerapan peraturan yang lebih terfokus sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari implementasi adalah untuk mencapai dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan peraturan atau program pemerintah tersebut dilaksanakan, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
2. Kebijakan didefinisikan sebagai semua aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diikuti dan diterapkan tanpa kecuali sebagai pedoman atau dasar hukum. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mencakup semua peraturan yang ditetapkan untuk mencapai target yang telah sesuai dan harus dilaksanakan.
3. Penanggulangan adalah tindakan terkoordinasi yang ditujukan untuk mengatasi serta menghadapi dampak yang muncul dari kejadian tertentu.
4. Kemiskinan adalah keadaan yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar, terutama dalam hal konsumsi dan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang Digunakan

Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Untuk menyampaikan data, penulis memanfaatkan penjelasan serta visualisasi, karena tujuan penulis adalah untuk menggambarkan keadaan, kondisi, dan kejadian dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang diterapkan oleh penulis adalah Purposive Sampling, yang berarti bahwa pemilihan sampel atau informan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam metode ini, peneliti memilih dan menetapkan beberapa informan yang dianggap memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, terdapat dua jenis informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci mencakup Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon serta Camat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan informan pendukung terdiri dari staf pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon serta staf pegawai Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon..

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dipakai untuk mendapatkan informasi. Metode ini menunjukkan suatu pendekatan sehingga dapat ditunjukkan lewat wawancara, pengamatan, analisis, dokumentasi, dan lain-lain..

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Penting untuk membuktikan kebenaran data dalam penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2011:330), triangulasi adalah “metode untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut untuk tujuan verifikasi atau sebagai perbandingan. ” Dengan menggunakan teknik pengujian keabsahan data, penulis memilih triangulasi sebagai cara membandingkan berbagai informasi (sumber, metode, dan teori) yang diperoleh melalui pemeriksaan berulang dan pengecekan silang terhadap data yang ada.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam studi ini adalah metode analisis data deskriptif, yaitu suatu bentuk penulisan yang mencerminkan kondisi nyata dari objek yang diteliti sesuai dengan keadaan sesungguhnya saat penelitian dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan bantuan informasi tambahan yang bisa memperkuat penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan pelaksanaan kebijakan pencegahan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Selanjutnya, langkah-langkah dalam analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33) adalah:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlangsung di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Berikut adalah alasan penulis memilih lokasi tersebut:

1. Terdapat permasalahan yang ada terkait penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. Data yang diperlukan untuk penelitian mudah diakses;
3. Posisi lokasi yang strategis dan mudah dijangkau

Jadwal Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 4 bulan, yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah langkah yang disarankan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang menghadirkan

batasan-batasan dan kesempatan-kesempatan untuk kebijakan yang diusulkan, guna memanfaatkan dan mengatasi demi mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran atau maksud tertentu (dalam Winarno, 2014:20)

Pengertian Kebijakan Publik

James Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik dalam sistem politik kontemporer tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil perencanaan oleh para pelaku yang terlibat dalam sistem tersebut. Kebijakan publik memiliki fokus pada arah atau cara bertindak yang diambil oleh para pejabat pemerintah dan bukan hanya merupakan keputusan yang terpisah (dalam Winarno 2014:21).

Tinjauan Implementasi Kebijakan Pengertian Implementasi

Konsep pelaksanaan diambil dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu to implement. Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:87) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini umumnya berhubungan dengan suatu aktivitas yang dilakukan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Van Metter dan Varn Horn menurut Winarno (2014: 149) menyatakan bahwa realisasi kebijakan ialah: "Realisasi kebijakan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh orang-orang (atau kelompok-kelompok) baik dari pemerintah atau sektor swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan dalam kebijakan yang sebelumnya".

Kemiskinan

Pengertian Kemiskinan

Kurnianingsih (2012:47) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai: "Ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhannya sendiri yang bersifat relatif sesuai dengan pandangannya, meliputi kelemahan dari segi ekonomi serta faktor

non-ekonomi seperti aspek sosial, politik, dan spiritual.”

Objek Penelitian

Sejarah Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Kecamatan Harjamukti di Kota Cirebon merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Kecamatan ini terdiri dari lima kelurahan, yaitu Harjamukti, Larangan, Kecapi, Kalijaga, dan Argasunya. Terdapat 77 Rukun Warga (RW) dan 416 Rukun Tetangga (RT) di area ini. Menurut data terakhir pada bulan Desember 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Harjamukti mencapai 121.385 orang, yang terdiri dari 61.199 laki-laki dan 60.186 perempuan, dengan total Kepala Keluarga (KK) sebanyak 32.347.

Sebagai bagian dari Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti memiliki luas sekitar 17,62 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 47,175 persen dari total luas Kota Cirebon yang mencapai 37,35 kilometer persegi. Ketinggian rata-rata daerah ini berada antara 6 hingga 26 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata sekitar 27,3 derajat Celsius. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Drajat di Kecamatan Kesambi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pamengkang di Kabupaten Cirebon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kecomberan di Kabupaten Cirebon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pengambiran di Kecamatan Lemahwungkuk.

Visi dan Misi

Visi

“Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Profesionalisme Di Kecamatan Harjamukti Guna Meningkatkan Pembangunan Yang Mandiri Dan Sejahtera”.

Misi

Misi adalah suatu yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Instansi/SKPD agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dimasa yang akan datang.

1. Membangun tolok ukur layanan publik untuk mencapai pelayanan yang terbaik;
2. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan;
3. Membentuk suasana yang teratur, aman, dan menyenangkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Pada bab empat ini, penulis akan membahas hasil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”. Dari wawancara dengan beberapa sumber yang relevan, penulis menemukan beberapa informasi yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Tujuan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang dijalankan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti, yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 8 Juni 2020, dan Rabu, 10 Juni 2020, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon belum berjalan secara optimal. Salah satu contohnya adalah program bantuan sosial yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang belum merata,

sehingga menghalangi proses implementasinya.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan gejala-gejala yang telah ditemukan, untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, pertama-tama harus dirumuskan permasalahan yang akan menjadi panduan dalam penelitian tentang berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang mendukung maupun yang menghambat penerapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Pengukuran suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan yang ada, dari proyek individu, serta apakah tujuan program tersebut tercapai.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan berhubungan dengan masalah ini, yang berpotensi menentukan apakah suatu masalah publik dapat diatasi atau tidak. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (i) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan; (ii) Sumber-Sumber Kebijakan; (iii) Komunikasi antara Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan; (iv) Karakteristik Badan-Badan Pelaksana; (v) Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik; (vi) Kecenderungan Pelaksana (Implementors).

Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah dilaksanakan, agar hal tersebut sesuai dengan program yang telah direncanakan.

Tujuan kebijakan merupakan bagian dari proses itu sendiri; sebelum sebuah kebijakan ditetapkan, terdapat tujuan yang ingin dicapai sehingga kebijakan dibuat untuk memenuhi tujuan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH., Mkn, selaku Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, diungkapkan bahwa: "Tujuan dari kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Cirebon. Namun, tujuan tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, belum dapat dicapai secara optimal, dikarenakan permasalahan sosial yang ada cukup kompleks untuk dipecahkan." (Senin 8 Juni 2020 pukul 10.00 WIB)

Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat serangkaian panduan pelaksanaan dan pedoman teknis yang berlaku di dalam birokrasi, sehingga pelaksanaan sebuah kebijakan berlangsung sesuai dengan rencana program dan mencapai tujuan yang diinginkan dari program itu.

Hasil wawancara dengan Bapak Sutaryo yang menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Harjamukti, mengungkapkan bahwa: "Sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja di lapangan, saya lebih memahami secara langsung isu-isu yang ada di masyarakat. Masyarakat sering menuntut agar bantuan sosial diberikan dengan adil. Terkadang saya mengalami dilema sebagai petugas lapangan, meskipun saya telah berusaha semaksimal mungkin agar semua warga miskin menerima bantuan sosial." (Senin 8 Juni 2020 pukul 13.30 WIB)

Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber dana berfungsi sebagai pendorong yang memperlancar penerapan kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH., Mkn, selaku Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, menyatakan bahwa: "Anggaran yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon bersumber dari APBN dan APBD Provinsi saja. Namun, ada juga dana dari perusahaan-perusahaan swasta yang langsung disalurkan ke kelurahan tanpa pemberitahuan melalui Dinas Sosial atau Kecamatan." (Senin 8 Juni 2020 pukul 10.00 WIB)

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber utama untuk melaksanakan kebijakan adalah personel atau sumber daya manusia. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH., Mkn, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, beliau menyatakan bahwa: "Untuk menerapkan kebijakan pengurangan kemiskinan di Kota Cirebon, dibutuhkan pekerja sosial, pendamping, dan penyuluh sosial yang memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman dalam memberikan pelayanan sosial. Jika kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan, maka para pekerja sosial akan mendapatkan penghargaan atau imbalan." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 10.00 WIB)

Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Ketepatan cara berkomunikasi para pelaksana, konsistensi, dan keseragaman dari ukuran pokok serta sasaran kebijakan disampaikan melalui berbagai sumber informasi. Dengan demikian, para pelaksana bisa memahami apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran pokok dan sasaran kebijakan itu.

Koordinasi antar Instansi yang Tekait

Sinkronisasi yang rapi dalam usaha untuk menetapkan jumlah yang tepat, waktu, dan mengarahkan pelaksanaan yang menghasilkan harmoni serta aksi yang terintegrasi untuk tujuan lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Sutaryo sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Harjamukti, menyatakan bahwa: "Koordinasi saya sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Harjamukti tidak selalu berjalan mulus. Sebagai contoh, baru-baru ini di wilayah Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ada sebuah program yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon yaitu program KIP (Kartu Indonesia Pintar). Program ini diterima dari Dinas Pendidikan tanpa pemberitahuan kepada saya dan tanpa adanya komunikasi tentang perlunya tanda tangan TKSK dari Dinas Sosial." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 13.30 WIB)

Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu tugas manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam rencana. Dalam sebuah wawancara, Bapak Aria Dipahandi, SH., Mkn, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon menyampaikan bahwa: "Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap kali ada program, saya dan tim selalu terus memantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar program berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 10.00 WIB)

Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Sarana merujuk pada semua hal (baik syarat maupun usaha) yang dapat digunakan sebagai alat atau perantara untuk mencapai suatu tujuan atau maksud,

sedangkan prasarana mencakup semua hal yang menjadi dukungan utama dalam menjalankan suatu proses (seperti usaha, pembangunan, proyek, dan lain-lain).

Dalam wawancara dengan Bapak Sutaryo, yang merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Harjamukti, beliau menyampaikan bahwa: "Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon adalah LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial), lembaga pendidikan dan pelatihan, panti social untuk wanita, serta untuk penanganan anak yatim terdapat 17 yayasan di Kecamatan Harjamukti, dan lainnya." (Senin 8 Juni 2020 pukul 13. 30 WIB)

Karakteristik Badan-Badan Pelaksanaan Skill Para Pelaksana Kebijakan

Ketika pelaksana telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan, mereka perlu memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH. , Mkn, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, beliau menyatakan bahwa: "Pelaksana kebijakan dalam penanganan kemiskinan di Kota Cirebon, terutama di Kecamatan Harjamukti, menunjukkan keterampilan dan kemampuan yang baik, sesuai dengan fungsi dan tugas mereka masing-masing." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 10. 00 WIB)

Disiplin Para Pelaksana Kebijakan

Kemampuan para pelaksana kebijakan dalam mematuhi kewajiban dan menjauhi larangan yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan resmi, serta konsekuensi disiplin jika ada yang tidak dipatuhi atau dilanggar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oman Sukarman, SAP, yang menjabat sebagai Kepala Seksi

Perlindungan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, beliau menyatakan bahwa: "Sepertinya budaya disiplin kerja di Indonesia susah untuk diimplementasikan, khususnya disiplin mengenai waktu. Padahal, salah satu kunci keberhasilan adalah memiliki disiplin." (Kamis Pukul 11. 00 WIB)

Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Seberapa besar kontribusi faktor-faktor luar berperan dalam mendorong suksesnya kebijakan publik yang telah diambil. Situasi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak menguntungkan bisa menjadi penyebab utama ketidakberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Khodijah, A. Md yang menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon menyatakan bahwa: "Di sini, kondisi ekonomi tergolong kurang baik karena banyak masyarakat yang masih dianggap miskin. Namun, jika kita mengamati daerah Benda yang sering dianggap sebagai daerah tertinggal, rumah-rumah di sana sebenarnya cukup bagus dan kendaraan mereka juga ada. Hal ini disebabkan karena warga di sana umumnya bekerja sebagai pedagang buah yang merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain." (Rabu, 10 Juni 2020, Pukul 10. 00)

Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Kondisi sosial masyarakat yang dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, agama, budaya, dan lainnya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur sosial yang ada. Semakin lengkap infrastruktur sosial yang tersedia dan semakin baik pemanfaatannya, semakin

tinggi derajat kesejahteraan masyarakat dari segi sosial.

Dalam wawancara dengan Bapak Sutaryo, yang menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Harjamukti, beliau menyatakan bahwa: "Kondisi sosial di sini kurang baik, contohnya gotong royong yang mulai berkurang, pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan yang tidak memuaskan, angka pengangguran yang tinggi, serta kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Harjamukti di Kota Cirebon masih jauh dari kesejahteraan sosial. Mengenai situasi politik, pada tahun 2018 lalu diadakan pilkada serentak, setiap calon pasangan memiliki program-program yang menarik perhatian masyarakat untuk memberikan suara. Namun, setelah calon tersebut terpilih, program-program yang dijanjikan cenderung hilang. Ada juga masyarakat yang berkomentar, 'Kalau tidak diberi uang 200, saya tidak akan memilih.' (Senin, 8 Juni 2020, pukul 13. 30 WIB)"

Kecenderungan Para Pelaksana Motivasi Para Pelaksana Kebijakan

Motivasi adalah sebuah dorongan atau stimuli yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang ingin bekerja sama semaksimal mungkin dalam melaksanakan rencana tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam wawancara dengan Sutaryo, yang menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Harjamukti, diungkapkan bahwa: "Tugas dan peran saya serta rekan-rekan yang bertugas sebagai TKSK yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adalah salah satunya untuk memberi motivasi kepada mereka (masyarakat), yakni melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta sosialisasi yang dilakukan setiap bulan." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 13. 30 WIB)

Komitmen dari Para Pelaksana Kebijakan

Komitmen merupakan sebuah perasaan keterikatan, partisipasi, dan kesetiaan yang diungkapkan oleh seseorang terhadap organisasi atau lembaganya. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH. , Mkn, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, beliau menyatakan bahwa: "Sejauh ini, para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelaksana kebijakan. Tidak ada satu pun individu yang melanggar peraturan atau norma yang bertentangan dengan hukum yang berlaku." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 10. 00 WIB)

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, pasti ada faktor-faktor yang membantu agar proses kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH. , Mkn, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, yang menyampaikan bahwa: "Ya, dalam Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mengatasi Kemiskinan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon), harus tersedia faktor-faktor pendukung. Tanpa adanya dukungan tersebut, pelaksanaan kebijakan tidak akan bisa terwujud. Salah satu faktor pendukung yang sangat krusial adalah dana." (Senin, 8 Juni 2020, pukul 10. 00 WIB).

Faktor penghalang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kota Cirebon dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam wawancara dengan Bapak Aria Dipahandi, SH., Mkn, selaku Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, beliau menyatakan bahwa: "Apabila terdapat faktor yang mendukung, pasti juga ada faktor yang menghalangi. Permasalahan yang kami hadapi dalam usaha memerangi kemiskinan adalah terutama terkait dengan anggaran yang terbatas, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah, yang menjadi salah satu penghambat dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon." (Senin 8 Juni 2020 pukul 10.00 WIB).

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Dalam menjalankan penerapan kebijakan pengurangan kemiskinan, pasti akan ada faktor-faktor yang mendukung dan juga yang menghalangi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan berbagai upaya dari pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan agar tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut wawancara dengan Bapak Sutaryo yang menjabat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Harjamukti, ia menyatakan bahwa: "Langkah yang kami ambil untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon adalah dengan meningkatkan dana serta fasilitas yang ada, karena dana merupakan aspek yang paling krusial dalam melaksanakan kebijakan, demikian halnya dengan fasilitas." (Senin 8 Juni 2020 pukul 13.30 WIB)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon dapat diamati dari berbagai aspek.
2. Indikator dan Tujuan Kebijakan. Sasaran dari pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi kemiskinan di Kota Cirebon (Studi Kasus di Kecamatan Harjamukti) adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai karena distribusi program yang belum merata.
3. Sumber Kebijakan. Terdapat dua jenis sumber kebijakan, yaitu sumber pendanaan dan sumber daya manusia. Anggaran menjadi faktor pendorong yang sangat terbatas untuk pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, karena dana yang ada cuma berasal dari APBN dan APBD, sedangkan kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat maupun pelaksana kebijakan, masih belum memadai.
4. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Kebijakan. Tiga faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi antar organisasi dan aktivitas kebijakan dalam pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti adalah koordinasi antar lembaga terkait, pengawasan, serta kelengkapan fasilitas. Koordinasi antara Dinsos, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan masyarakat sudah berjalan dengan baik, namun pengawasan tenaga kerja sosial oleh Dinsos Kota Cirebon masih kurang

- optimal, dan fasilitas yang ada masih belum memadai.
5. Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik lembaga pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti mencakup kemampuan para pelaksana kebijakan. Kemampuan yang tercermin dari pengalaman dan keterampilan pelaksana sudah tergolong baik, namun disiplin mereka dalam menjalankan tugas, termasuk waktu dan tanggung jawab, masih harus diperbaiki.
 6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politikal. Situasi ekonomi, sosial, dan politik di Kecamatan Harjamukti saat ini tidak mendukung (negatif), artinya masih memerlukan perhatian lebih untuk diperbaiki.
 7. Kecenderungan Pelaksana. Kecenderungan pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti meliputi motivasi dan kesediaan dari para pelaksana kebijakan. Motivasi yang ditunjukkan oleh mereka cukup baik, melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Di sisi lain, komitmen para pelaksana kebijakan dapat diandalkan.

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

1. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti meliputi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kerjasama;
 - c. Pengumpulan data;
 - d. Peran pemerintah;
 - e. Keterlibatan masyarakat.
 2. Sebaliknya, ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti, antara lain:
 - a. Masyarakat itu sendiri;
 - b. Para pelaksana kebijakan;
 - c. Anggaran atau dana;
 - d. Komunikasi dan informasi.
2. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas masyarakat;
 - b. Penegakan disiplin dari pemerintah;
 - c. Mengoptimalkan sumber dana atau anggaran;
 - d. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dipaparkan, penulis ingin mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi terkait tujuan pelaksanaan bantuan untuk masyarakat. Ini penting agar masyarakat memahami bahwa bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
2. Diperlukan pendampingan khusus dalam penyaluran bantuan seperti sembako, uang tunai, serta alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lainnya. Pendampingan juga harus diarahkan untuk anak-anak terlantar, anak yang terlibat masalah hukum, dan anak-anak jalanan.
3. Pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan.
4. Proses identifikasi perlu dilakukan dengan sangat teliti agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan diklasifikasikan dengan jelas antara bantuan yang sesuai untuk masyarakat produktif dan non-produktif. Jika perlu, pemerintah harus berkomunikasi langsung dengan Rumah Tangga Sasaran untuk memahami jenis bantuan

dan kebutuhan yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Alfabeta

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Khomsan, Ali, dkk., 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Meleong, Lexy. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tamboto, dkk. 2019. *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Edisi Pertama)*, Malang: CV. Seribu Bintang

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik teori, proses dan studi kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*

Sumber Lain

BPS (*Badan Pusat Statistik*), 2019. Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Cirebon

<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/08/16/joko-wi-klaim-angka-kemiskinan-terendah-sepanjang-sejarah-ri> (Jumat, 16 Agustus 2019 18:33 WIB)

[https://portal-ilmu.com/konsep-kemiskinan-dan ketimpangan-sosial/](https://portal-ilmu.com/konsep-kemiskinan-dan-ketimpangan-sosial/) (Selasa, 14 Juli 2020 10:59 WIB)

Arsip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon

Janambani, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbul Harjo Yogyakarta. Skripsi Program Studi Ilmu Sosiatri/Pembangunan Sosial, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD). Yogyakarta

Pendataan Profil Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 2019

Arsip Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 2019

Munawir, Madani, Fatmawati, & Parawu. 2019. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program KUBE-FM DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANTAENG). *Journal Of Public Policy And Management, Vol 1 No.2*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jppm/article/view/3587/pdf>

Siswoyo M, Hidayat MT, & Wulandari S. 2020. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon. *MEDIA BINA ILMIAH, 14(6)*, 2807-2824, <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MB>. (31-5-2020)